



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 12 Agustus 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashih.

Ketua DPRD: Kecam Pelaku Pengoplosan Beras di Krembung

Dewan Usul Anggaran Perbaikan Jalan dan Penanganan Banjir Ditambah

SIDOARJO - DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2025 kemarin (11/8). Pemkab diminta memperbaiki sistem perencanaan dan disiplin. Dengan begitu anggaran dapat terserap dengan optimal.

Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem M. Zakaria Dimas Pratama mengungkapkan, tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) selama ini dipicu rendahnya serapan. Kondisi itu bisa dicegah dengan perbaikan perencanaan. "Begitu juga pelaksanaannya. Harus disiplin," katanya. Dimas juga menyarankan penambahan anggaran untuk sejumlah kebutuhan. Di antaranya pemeliharaan jalan, saluran irigasi, dan penanganan banjir.



DISKUSI: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana bersama Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashih dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait PAK APBD 2025 kemarin (11/8).

dengan membeli pompa besar. Dia juga menyinggung perlunya peningkatan intensif guru swasta. Termasuk evaluasi pelaksanaan rehab sekolah yang dinilai sering terlambat. Abud Asyrof dari Fraksi PKB menambahkan, anggaran PAK mengalami perubahan signifikan. Untuk pendapatan daerah, misalnya, naik Rp 3,2 miliar. "Perubahan ini harus mencerminkan upaya adaptasi pemerintah terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat," katanya. (edi/uzi)

Sidoarjo Raih Kota Layak Anak Tingkat Utama

Tahun 2025 ini Sidoarjo berhasil meraih Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat utama. Salah satunya, berkat optimalisasi Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA. Perda tersebut menjadi landasan bagi pembentukan forum anak, pusat pembelajaran keluarga, serta layanan pengaduan dan pendampingan anak."

HENI KRISTIANI Kepala DPPAKB Sidoarjo bicara terkait menjadikan Sidoarjo kota layak anak



Propemperda 2025 Ditetapkan Jadi Surat Keputusan DPRD Sidoarjo



Pengaduan Pers Semester I 2025 Pecahkan Rekor, Dewan Pers Soroti Media Abai Etika



Sidoarjo Sabet Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat Utama Tahun 2025

Sidoarjo, Pojok Kiri.- Kabupaten Sidoarjo kembali sabet prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Utama Tahun 2025. Penghargaan prestisius itu diserahkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganggarkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 22 kategori

Prestasi gemilang ini, lanjut dia, merupakan buah dari komitmen Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam Perda Perlindungan Anak dan Perda Pengarusutamaan Gender yang baru disahkan. "Perda ini adalah wujud nyata keseriusan Pemkab

Perlu diketahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganggarkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 22 kategori



ASET PEMKAB: Lahan di Kajeksan, Tulangan, yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat kemarin (11/8). Kebutuhan lahannya 5 hektare, namun masih tersedia 4,3 hektare.

Pemkab Tak Punya Lahan Kosong 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



IST

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.

Ketua DPRD: Kecam Pelaku Pengoplosan Beras di Krembung

KETUA DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengecam keras praktik pengoplosan beras yang dilakukan produsen di Kabupaten Sidoarjo. Kasus tersebut terbongkar setelah Satgas Pangan Polresta Sidoarjo menemukan 12,5 ton beras oplosan di Desa Keper, Kecamatan Krembung. “Praktik beras premium oplosan ini mencederai masyarakat, berdalih mengambil keuntungan setinggi-tingginya,” ucapnya.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai kepercayaan publik. Dia menilai kasus itu merupakan pelanggaran etika berdagang yang tidak bisa ditoleransi.

Ketua DPRD: Kecam...

Selain merugikan konsumen, praktik tersebut juga berpotensi mengacaukan harga di pasaran.

“Tentu saja kami sangat prihatin atas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini produsen,” ujarnya.

Nasih meminta aparat menindak pelaku tanpa kompromi. Dia menegas-

kan, penegakan hukum harus dilakukan tegas agar menimbulkan efek jera.

Selain itu, pihaknya juga akan terus memantau peredaran beras di Kota Delta. Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras yang sesuai standar mutu.

“Kami berharap agar pelaku dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Usul Anggaran Perbaiki Jalan dan Penanganan Banjir Ditambah

SIDOARJO - DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2025 kemarin (11/8). Pemkab diminta memperbaiki sistem perencanaan dan disiplin. Dengan begitu anggaran dapat terserap dengan optimal.

Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem M. Zakaria Dimas Pratama mengungkapkan, tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) selama ini dipicu rendahnya serapan. Kondisi itu bisa dicegah dengan perbaikan perencanaan. "Begitu juga pelaksanaannya. Harus disiplin," katanya.

Dimas juga menyarankan penambahan anggaran untuk sejumlah kebutuhan. Di antaranya pemeliharaan jalan, saluran irigasi, dan penanganan banjir



DISKUSI: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana bersama Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait PAK APBD 2025 kemarin (11/8).

dengan membeli pompa besar.

Dia juga menyinggung perlunya peningkatan intensif guru swasta. Termasuk evaluasi pelaksanaan rehab sekolah yang dinilai sering terlambat.

Abud Asyrofi dari Fraksi PKB menambahkan, rancangan PAK

mengalami perubahan signifikan. Untuk pendapatan daerah, misalnya, naik Rp 3,2 miliar. "Perubahan ini harus mencerminkan upaya adaptasi pemerintah terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat," katanya. (edi/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Raih Kota Layak Anak Tingkat Utama

🗨️ Tahun

2025 ini
Sidoarjo
berhasil
meraih



Kabupaten Layak Anak
(KLA) tingkat utama. Salah
satunya, berkat optimalisasi
Peraturan Daerah (Perda)
No 2 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan KLA.
Perda tersebut menjadi
landasan bagi pembentukan
forum anak, pusat
pembelajaran keluarga,
serta layanan pengaduan
dan pendampingan anak.”

HENI KRISTIANI

*Kepala DPPPACB Sidoarjo bicara
terkait menjadikan Sidoarjo kota*

layak anak

Jawa Pos



Sidoarjo Sabet Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat Utama Tahun 2025

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Kabupaten Sidoarjo kembali sabet prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Peringkat Utama Tahun 2025. Penghargaan prestisius itu diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi kepada Bupati Sidoarjo Subandi SH. M.Kn pada Malam Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pencapaian KLA peringkat Utama ini merupakan peningkatan signifikan dari raihan sebelumnya, yaitu di tingkat Nindya. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi komprehensif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Juga, semakin diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Perda tersebut menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya memenuhi dan melindungi hak-hak anak serta mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi SH. M.Kn menyatakan rasa syukur dan bangga atas limpahan prestasi ini.

"Alhamdulillah. Setelah melalui berbagai tahapan dan evaluasi, Sidoarjo berhasil naik ke tingkat Utama KLA," ungkap Bupati Subandi.

Prestasi gemilang ini, lanjut dia, merupakan buah dari komitmen Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam Perda Perlindungan Anak dan Perda Pengarusutamaan Gender yang baru disahkan.

"Perda ini adalah wujud nyata keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesetaraan gender," terangnya.

Lebih lanjut, Bupati Subandi menekankan bahwa keberhasilan ini juga merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta berbagai stakeholder di Kabupaten Sidoarjo.

"Dukungan dan kerja sama dari semua pihak menjadi kunci utama keberhasilan ini. Dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program-program KLA," tambahnya.

KLA Peringkat Utama merupakan penghargaan yang tertinggi dalam penilaian KLA.

Keberhasilan Sidoarjo meraih Peringkat Utama menunjukkan komitmen kuat Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak.

Penilaian KLA melibatkan berbagai indikator. Di antaranya, pemenuhan hak sipil anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 22 kategori Utama, 69 kategori Nindya, 125 kategori Madya, dan 139 kategori Pratama.

Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) pun turut diberikan kepada 13 Provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAKB) Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani SPd MM menjelaskan, pengesahan Perda KLA telah memperkuat payung hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pro-anak.

Dengan adanya Perda ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengimplementasikan program-program. Seperti, pembentukan Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta layanan pengaduan dan pendampingan bagi anak yang membutuhkan.

"Kami sangat berterima kasih atas visi dan dukungan penuh dari Bapak Bupati (Subandi) terkait perlindungan anak dan pengarusutamaan gender," ungkap Heni Kristiani. (Khol/dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Propemperda 2025 Ditetapkan Jadi Surat Keputusan DPRD Sidoarjo



Sidoarjo, Ariunanusantaranews.com.- Propemperda 2025 ditetapkan jadi surat keputusan DPRD Sidoarjo. Dalam rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (11/8/2025) terkait pengumuman dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ini adalah rencana penyusunan peraturan daerah (Perda) dalam satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo masa persidangan ke tiga Tahun sidang 2025 dengan pembacaan rancangan surat keputusan DPRD Sidoarjo tentang perubahan atas surat keputusan DPRD Sidoarjo nomor 36 tahun 2024 tentang program Perda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo tersebut telah dihadiri oleh ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Anggota DPRD Forkopimda, para Komandan kepala Kesatuan TNI dan Polri, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris daerah dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, serta kepala instansi vertikal direktur BUMN dan BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu, Rektor Perguruan tinggi dan pimpinan partai politik serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memimpin rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2025. Dengan acara pengumuman dan penetapan perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Sidoarjo pada (5/8/2025) yang ditindaklanjuti dengan berita acara rapat Badan Musyawarah DPRD Sidoarjo dengan acara sebagai berikut :

1. Pembacaan surat masuk
2. Pembacaan rancangan surat keputusan DPRD Sidoarjo tentang perubahan atas surat keputusan DPRD



Sidoarjo nomor 36 tahun 2004 tentang propemperda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Pengumuman dan penetapan perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

3. Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama.

Berdasarkan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai jumlah anggota dewan yang hadir dalam persidangan ini sebanyak 36 orang. Jumlah tersebut sesuai pasal 101 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD Sidoarjo nomor 1 tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan DPRD Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD Sidoarjo nomor 1 tahun 2018 tentang tatib DPRD Sidoarjo telah memenuhi kuorum. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim rapat paripurna DPRD Sidoarjo masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 pada hari ini Senin (11/8/2025) kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

Acara yang pertama yaitu pembacaan surat masuk dilanjutkan pembacaan rancangan produk putusan DPRD Sidoarjo tentang perubahan atas keputusan DPRD Sidoarjo nomor 36 tahun 2024 tentang propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 yang akan dibacakan oleh sekretaris DPRD Sidoarjo.

Hari Sucahyono, SH, M.Si. Sekretaris DPRD Sidoarjo telah membacakan surat masuk Bupati Sidoarjo tanggal 24 April 2025 Nomor 000/424/438. 1. 1. 3/2025

1. Perihal usulan perubahan propemperda tahun 2025.

2. surat Bupati Sidoarjo tanggal 5 Juni 2025 nomor 0000/6133/438. 1. 1. 3/2025 perihal permohonan perubahan propemperda tahun 2025

3. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 28 Juli 2025 No. 1000. 3. 2/8430/438. 1. 1. 3/2025 perihal penyampaian usulan perubahan propemperda tahun 2025.



Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo nomor tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 36 tahun 2024 tentang perubahan pembentukan peraturan daerah.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan

1. Perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.
2. Daftar perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum satu tercantum dalam perancang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran :

Rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

a. Daftar Usulan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo

1. Raperda penvelenggaraan pengujian kendaraan bermotor pengusul Dinas Perhubungan
2. Raperda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pengusul satpol PP
3. Raperda perubahan Raperda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengusul BPPD
4. Raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2045 pengusul Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata
5. Raperda Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2024 pengusul bpkad
6. raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten anggaran 2026 pengusul bpkad.
7. Raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 pengusul bpkad
8. Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 pengusul BAPPEDA
9. Raperda pelaksanaan sekolah dari Madrasah pengusul bagian Kesra
10. Raperda penvelenggaraan Pelayanan dan perlindungan ketenagakeriaan pengusul Disnaker
11. Raperda perubahan kedua tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo pengusul bagian Organisasi
12. Raperda perusahaan perseorangan daerah bank perekonomian rakyat Delta Artha pengusul bagian Perekonomian
13. Raperda penyertaan modal perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat Delta Artha pengusul bagian Perekonomian
14. Raperda pencabutan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan pengusul Dinas P2CKTR

b. Daftar usulan DPRD Kabupaten Sidoarjo

1. Raperda perubahan atas keria nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan, pengusul komisi D



2. Raperda fasilitasi pengembangan Pesantren, pengusul komisi D

3. Ada penyelenggaraan kesehatan hewan, pengusul komisi B

Pembacaan surat dan pembacaan rancangan surat keputusan DPRD Sidoarjo tentang perubahan atas surat keputusan DPRD Sidoarjo Nomor 36 tahun 2004 tentang propemperda tahun 2025 selanjutnya ditetapkan menjadi surat keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Propemperda 2025 ditetapkan jadi surat keputusan DPRD Sidoarjo. Dengan begitu telah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Berita acara kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo (dihadiri Wakil Bupati) Sidoarjo terhadap perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.

Dari hasil rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan penetapan perubahan propemperda Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, semoga pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik teratur dan tetap memperhatikan skala prioritas dalam dinamika pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo masa persidangan ketiga tahun 2025 telah berakhir dan di tutup dengan membaca do'a surat Al-Ashr oleh pimpinan rapat Abdillah Nasih.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pengaduan Pers Semester I 2025 Pecahkan Rekor, Dewan Pers Soroti Media Abai Etika



Dewan Pers

Filesatu.co.id, JAKARTA | DEWAN Pers mencatat lonjakan signifikan pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan media selama Januari–Juni 2025, mencapai 625 kasus. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir untuk periode yang sama (5/8/2025).

Juni 2025 menjadi bulan dengan aduan terbanyak, yaitu 199 kasus, di mana 191 kasus telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses. Dari total pengaduan semester pertama ini, 424 kasus atau 67,84 persen berhasil diselesaikan melalui mekanisme surat-menyurat (316 kasus), arsip (84 kasus), mediasi/risalah (21 kasus), dan ajudikasi/Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi atau PPR (3 kasus).

Beberapa kasus menonjol antara lain aduan Kementerian Pertanian terhadap visual berita “Poles-Poles Beras Busuk” yang dinilai melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, serta aduan Taman Safari Indonesia (TSI) terhadap sekitar 14 media atas pemberitaan yang dinilai menvesatkan dan mencemarkan nama baik.



Dewan Pers menilai lonjakan pengaduan dipicu oleh meningkatnya kesadaran publik akan haknya dalam pemberitaan, kemudahan mengakses kanal aduan, serta penurunan kualitas jurnalistik yang ditandai dengan maraknya judul clickbait, minimnya verifikasi, dan pencampuran fakta dengan opini. Faktor lain adalah adanya pengaruh kepentingan non-jurnalistik terhadap redaksi media.

Selain itu, Dewan Pers menyoroti praktik kerja sama iklan dan publikasi antara pemerintah daerah dengan media yang belum terverifikasi maupun wartawan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Praktik ini dinilai rawan memicu pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan karena mengaburkan batas antara konten jurnalistik dan advertorial berbayar.

Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Pers terus mendorong Sertifikasi Kompetensi Wartawan, hingga kini tercatat 12.936 wartawan tersertifikasi, termasuk 4.500 yang difasilitasi dalam tiga tahun terakhir. Dewan Pers juga memperketat pengawasan terhadap media yang menyebarkan konten tidak etis serta meluncurkan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers pada 24 Juni 2025 bekerja sama dengan LPSK dan Komnas Perempuan.

"Media harus memprioritaskan kualitas jurnalistik yang akurat, seimbang, dan etis. Uji informasi, hormati hak jawab, dan lakukan koreksi bila diperlukan," tegas Dewan Pers dalam pernyataan resminya.

Dewan Pers menegaskan komitmennya menjaga kemerdekaan pers sekaligus memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif tetap terjamin.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bappemperda Yakin 17 Raperda Tuntas Hingga Akhir 2025

SIDOARJO

(liputansidoarjo.com)-

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sidoarjo, menargetkan 17 Raperda disahkan menjadi Peraturan Daerah di empat bulan terakhir tahun 2025 ini.



Wahyu Lumaksono S Pd

Wahyu Lumaksono S Pd ketua Bapemperda DPRD Sidoarjo saat ditemui di kantor DPD Golkar Sidoarjo, Senin (11/8/2025) menyatakan optimis mampu menuntaskan seluruh Raperda itu dengan maksimal.

“Sisa waktu empat bulan ini akan kita kebut seluruh pembahasan Raperda yang ada, insyaAllah bisa tuntas maksimal seluruh Raperda ini, karena Naskah Akademik (NA) masing-masing Raperda sudah siap,” ujar Wahyu Lumaksono.

Masih menurut Wahyu, dari 17 Raperda itu, ada empat Raperda baru serta ada dua Raperda penyesuaian yang harus di lepas untuk dibahas di tahun 2026 nanti.

Untuk empat Raperda baru, merupakan usulan dari OPD diantaranya Raperda penvelenggaraan pengujian kendaraan bermotor usulan Dinas Perhubungan, Raperda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat usulan Satpol PP.

“Juga ada Raperda Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah usulan BPPD, serta dari Dispora yang mengusulkan Raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sidoarjo 2025-2045,” ujar politisi Golkar ini.

Liputan Sidoarjo.com

Sedangkan untuk Raperda yang mesti dilepas pembahasannya adalah Raperda pencegahan peningkatan kualitas pemukiman kumuh usulan Bappeda serta Raperda fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba usulan dari Bakesbangpol.

“Selain Raperda tambahan diatas, kita juga akan melanjutkan Raperda yang sudah masuk program di tahun 2025 yakni Raperda inisiatif dari komisi B dan Komisi D,” terang Wahyu.

Untuk Raperda inisiatif komisi B yakni Raperda penyelenggaraan kesehatan hewan, dan Raperda inisiatif komisi D ada dua yakni Raperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dan Raperda fasilitasi pengembangan pesantren.

“Ada dua Raperda yang terbilang urgen untuk segera dijadikan Perda yakni Raperda UKS dan Raperda perubahan atau pencabutan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang ijin mendirikan bangunan yang sekarang menjadi Perijinan Bangunan Gedung,” tutup Wahyu.

Sementara itu pada pembahasan seluruh Raperda diatas, Wahyu menegaskan tidak ada yang akan dibahas di dalam pantai khusus atau Pansus.

Selain karena waktu yang terbilang pendek, pembahasan Raperda melalui komisi akan lebih efektif dan cepat. (Abidin)

Beras Murah Polsek Balongbendo Ludes Terjual 3 Ton Sehari

SIDOARJO - Polsek Balongbendo Polresta Sidoarjo menggelar bazar beras murah bertema "Polri untuk Masyarakat, Polresta Sidoarjo Gerakan Pangan Murah" di Mako Polsek Balongbendo, Senin (11/8/25). Dalam kegiatan ini, 3 ton beras jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disediakan ludes terjual kepada warga.

Kapolsek Balongbendo, AKP Sugeng Sulistiyono, S.H., M.H. menyampaikan bahwa bazar ini merupakan kerja sama Polresta Sidoarjo dengan Bulog, BUMN, dan Badan Pangan Nasional. "Beras dijual seharga Rp 60.000 per sak ukuran 5 kg, atau Rp 12.000 per kilogram. Penjualannya dibantu Bhabinkamtibmas di 20 desa se-Kecamatan Balongbendo," jelasnya.

Setiap pembeli diwajibkan membawa fotokopi KTP, sementara informasi bazar disampaikan langsung oleh Bhabinkamtibmas kepada warga desa

binaan masing-masing," terang AKP Sugeng.

Beras murah SPHP yang disiapkan sebanyak 600 sak ukuran 5 kg (total 3 ton) habis terjual dengan nilai penjualan mencapai Rp 36 juta. Hingga siang hari, tercatat 248 sak sudah terjual, sebelum akhirnya seluruh stok habis diborong warga.

Dua warga yang ditemui menyampaikan apresiasinya. "Terima kasih kepada Polsek Balongbendo, kegiatan ini sangat membantu kami mendapatkan beras dengan harga terjangkau," ujar Santi, warga Desa Kemangsen.

Hal senada disampaikan Farid, warga Balongbendo, yang berharap program ini dapat rutin dilaksanakan.

Dengan adanya bazar beras murah ini, diharapkan masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran. ● Loe



LOETFI/DUTA

Warga Kecamatan Balongbendo membeli beras murah di Mako Polsek Balongbendo, Senin (11/8/25).

CS Dipindai dengan CamScanner

KETUA LSM MINTA KEJARI GARCEP USUT PEMDES TROSOBO YANG DIDUGA MARK UP PEMBANGUNAN PROYEK PAVINGINASI

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Seperti diberitakan di harian koran ini sebelumnya, Pemerintahan Desa (PEMDES) Trosobo Kec Taman Kab Sidoarjo di duga melakukan Mark up terkait pembangunan proyek pavinginasi di RT 01 RW 07 (Mbah Taman) menggunakan anggaran dana desa (DD) Rp 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) di papan proyek volume tidak di sebutkan, di sini sudah kelihatan bahwa proyek tersebut memang ada keganjilan.

LSM GEMPAR DPD SIDOARJO yang di pimpin langsung oleh ketua nya (Agus Harianto) melakukan kroscek pekerjaan yang di lapangan ternyata untuk pengurukan (pekerasan) tanah yang di gunakan bukan material Sertu Uruk melainkan Tanah kali, hal ini jelas di duga jelas ada indikasi penipuan untuk mengambil keuntungan, di samping itu kalau memakai urukan dari tanah kali di pastikan jalan tersebut tidak akan bertahan lama (ambles) karena material Dasar tidak sesuai dengan Spek untuk pengerjaan proyek Pavinginasi.

Dengan begitu sangat ironis dana sebesar Rp 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) yang telah di gelontorkan, publik tidak menemukan informasi yang jelas mengenai volume pekerjaan yang sebenarnya untuk di kerjakan, baik dalam bentuk dokumen resmi maupun papan informasi proyek, hal ini jelas bertentangan dengan semangat transparansi dan keterbukaan informasi



publik sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta regulasi penggunaan Dana Desa. Olehkarenanya ia minta pada pihak penegak hukum dalam hal ini Kejari Sidoarjo agar supaya garcep untuk memeriksa proyek yang di duga merugikan uang negara itu, Pinta ketua LSM pada wartawan, Senin (11/8/25).

Sedangkan Untuk menindak lanjuti kebenarannya ketua LSM GEMPAR DPD SIDOARJO (Agus Harianto) mendatangi kantor Desa Trosobo Kec Taman Sidoarjo untuk meminta klarifikasi dari pihak pemerintahan desa terkait proyek tersebut.

Waktu kami datang di kantor desa di temui langsung oleh kepala desa Trosobo BPK Karyono (PLH). pak Modin dan Sekretaris desa (sekdes) Satrio, secara terbuka Agus ketua LSM Gempar Sido-

arjo menanyakan terkait papan proyek "Bagaimana bisa menghitung klo volume tidak di ketahui seperti yang tertera di papan proyek "Apakah memang itu di sengaja atau terjadi kekeliruan dalam penulisan di papan proyek," ujar Agus pada kepala desa dan sekdes, dengan nada sopan pak Karyono (kades PLH) menjawab memang itu ada kesalahan insya Allah nanti segera akan kami betulkan. ucap kades pada kami dan pihak pemerintahan desa juga mengucapkan terima kasih kepada LSM Gempar Sidoarjo atas informasi yang di berikan terkait proyek pavinginasi tersebut, tidak ketinggalan Satrio selalu sekdes juga mengatakan bahwa untuk kedepannya akan kami lakukan pembenahan," ujarnya.

Namun Agus ketua LSM Gempar Sidoarjo tidak puas dengan jawaban tersebut. Agus meminta kepada sekdes untuk menunjukan RABnya

namun tidak di perbolehkan dengan alasan yang tidak masuk di akal, katanya hanya orang orang yang bersangkutan, padahal Agus sudah menjelaskan bahwa untuk media dan LSM itu berhak dan di perbolehkan melihat RAB proyek desa, namun Satrio (sekdes) tetap ngotot tidak mau untuk memperlihatkan.

Di sini sudah kelihatan kenapa RAB tidak boleh di lihat oleh media dan LSM, berarti kemungkinan besar ada dugaan bahwa proyek pavinginasi tersebut ada indikasi kecurangan dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

"Kami dari LSM Gempar DPD Sidoarjo tetap akan terus mengawal sampai tuntas dan apabila ada indikasi kecurangan maka kami harap kepada pihak yang berwenang segera menindak lanjuti kasus ini," ujarnya. (Khol/Id/bersambung)

Dipindai dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

ASET PEMKAB: Lahan di Kajeksan, Tulangan, yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat kemarin (11/8). Kebutuhan lahannya 5 hektare, namun masih tersedia 4,3 hektare.

Pemkab Tak Punya Lahan Kosong 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat

SIDOARJO - Pembangunan sekolah rakyat (SR) urung terbangun tahun ini. Penyebabnya, lahan yang disiapkan kurang dari 5 hektare. Sedangkan, Pemkab tak ada lahan lainnya sebagai pengganti.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Bashori Alwi mengungkapkan, lahan di Desa Kajeksan adalah yang paling luas yang dimiliki pem-

kab. "Di Kajeksan lahan 4,3 hektare itu sudah paling luas. Kami sudah buka-buka data di bidang aset tidak ada yang 5 hektare dan berupa hamparan," katanya kemarin (11/8).

Bashori mengatakan, lahan pemkab banyak. Namun terpisah. Selain itu tidak ada aset yang tepat 5 hektare sesuai syarat dari pemerintah pusat. "Di lahan yang sekarang direncanakan se-

benarnya kurang 0,7 hektare, satu-satunya cara ya pembebasan lahan," paparnya.

Bhasori mengatakan soal pembebasan lahan untuk SR ini belum ada pembahasan, khususnya mengenai penganggaran. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut bupati untuk membebaskan lahan menjadi lima hektare. Artinya, belum bisa mulai dibangun tahun ini. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tunggakan Iuran Peserta BPJS Mandiri Tembus Rp 115,9 Miliar

SIDOARJO - Jumlah tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri di Sidoarjo nilainya mencapai Rp 115,9 miliar. Total ada 126.852 peserta mandiri yang belum membayar iuran sejak 2014 hingga tahun ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Munaqib menyebut, saat ini peserta aktif di Kota Delta tercatat 78,94 persen. Sementara proporsi peserta yang menunggak berada mencapai 6,28 persen. "Ada 126 ribu peserta yang menunggak dan otomatis kepesertaannya menjadi non aktif," ujarnya kemarin (11/8).

Menurutnya, peserta yang non aktif masih bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Salah satu syaratnya, mereka harus masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang didanai APBD. Dengan status universal health coverage (UHC) di Sidoarjo, warga yang memenuhi persyaratan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bisa berobat tanpa biaya.

Munaqib mengimbau agar peserta yang menunggak tetap mencicil kewajiban mereka. Salah satunya melalui program rehabilitasi tunggakan. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PROF DRs SUROTO UNTUK JAWA POS

TERPILAH: Sulistiyono memanfaatkan bank sampah di depan Gedung Posyandu RW 06 Perum Taman Surya Agung Desa Wage kemarin (11/8).

250 Warga Taman Dilatih Kelola Sampah

SIDOARJO - Sampah di Perumahan Taman Surya Agung dikumpulkan dari depan rumah dan diangkut ke TPS setiap Selasa dan Jumat, sebelum dibawa ke TPA. Namun, setiap pekan masih ada 3-4 meter kubik sampah yang sebagian besar masih bercampur antara organik dan anorganik, menimbulkan bau dan mengundang lalat.

Untuk mengatasi masalah ini, Tim PKM Universitas Negeri Surabaya (Unesa) turun tangan melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2025. Selama 19 Juli-10 Agustus, tim PKM yang terdiri atas Prof Drs Suroto, Prof Dr Rusijono, dan Fifukha Dwi Khory MPd memberikan solusi dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Lebih dari 250 warga dibekali pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sampah.

Mereka juga memberikan bank sampah plastik serta

lima unit komposter aerobik untuk tiap RT (RT 01-RT 05) agar sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos. "Kalau sampah dipilah sejak dari rumah, bisa mengurangi beban TPS dan TPA, juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif," jelas Prof Rusijono, anggota tim PKM Unesa.

Selain pelatihan teknis, program ini juga mengajak warga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui sosialisasi tatap muka di masing-masing RT, disertai tes awal dan tes akhir untuk mengukur peningkatan pemahaman warga. "PKM ini kami rancang agar keberlanjutannya dijalankan oleh warga sendiri. Zero Waste bukan sekadar slogan, tapi menjadi gaya hidup di lingkungan RT dan RW," tutur Fifukha Dwi Khory. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tunggakan Iuran Peserta BPJS Mandiri Tembus Rp 115,9 Miliar

SIDOARJO - Jumlah tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri di Sidoarjo nilainya mencapai Rp 115,9 miliar. Total ada 126.852 peserta mandiri yang belum membayar iuran sejak 2014 hingga tahun ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Munaqib menyebut, saat ini peserta aktif di Kota Delta tercatat 78,94 persen. Sementara proporsi peserta yang menunggak berada mencapai 6,28 persen. "Ada 126 ribu peserta yang menunggak dan otomatis kepesertaannya menjadi non aktif," ujarnya kemarin (11/8).

Menurutnya, peserta yang non aktif masih bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Salah satu syaratnya, mereka harus masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang didanai APBD. Dengan status universal health coverage (UHC) di Sidoarjo, warga yang memenuhi persyaratan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bisa berobat tanpa biaya.

Munaqib mengimbau agar peserta yang menunggak tetap mencicil kewajiban mereka. Salah satunya melalui program rehabilitasi tunggakan. (eza/uzi)

Jawa Pos

Pembebasan Lahan Sekolah Rakyat di Tulangan Belum Tuntas

TULANGAN-Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Tulangan masih jalan di tempat. Hingga kini, belum ada perkembangan terkait pengadaan lahannya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Sidoarjo, Bashori Alwi mengatakan, luasan lahan yang dipersyaratkan belum terpenuhi. Kekurangan tersebut yang membuat proses pembangunan terhambat.

● Ke Halaman 10



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

KURANG LUAS: Lokasi tanah yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Kajeksan Tuiangan.

Pembebasan Lahan Sekolah...

Menurutnya, Pemkab belum menganggarkan pembebasan lahan tambahan. Padahal, Bupati sempat menyampaikan perlunya perluasan dengan membeli atau membebaskan tanah di sebelah lokasi yang ada.

"Sejauh ini belum berhasil dibebaskan, karena memang dari sisi lahan yang dipersyaratkan kita masih kurang," ucapnya kepada Radar

Sidoarjo, Senin (11/8).

Bashori menambahkan, opsi pemindahan lokasi sulit dilakukan. Pasalnya, tidak ada tanah milik Pemkab lain yang luasnya di atas lima hektare dalam satu hamparan.

"Di Sidoarjo, lahan Pemkab umumnya terpisah-pisah, contohnya di Kajeksan, meski totalnya delapan hektare tapi itu terbagi dalam empat titik, itu pun yang terluas hanya 4,3 hektare dan masih kurang 0,7 hektare," jelasnya.

Jarak antar bidang lahan sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun, Kementerian PUPR tidak mengizinkan lahan yang terpisah-pisah untuk proyek SR.

Karena itu, pihaknya terus berupaya membebaskan lahan tambahan. Sebab hal itu menjadi satu-satunya jalan agar pembangunan bisa berjalan.

Belum adanya pembebasan lahan membuat timeline pembangunan belum jelas. "Belum ada tanda-tandanya," pungkasnya. (sai/vga)